

DAPAT PERHATIAN KHUSUS KPK Abaikan Sistem Merit, Kehilangan Kewenangan

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyelenggarakan Penguatan Komitmen Pembangunan Sistem Merit di Aula lantai III Kantor Setda Kabupaten Sleman, Rabu (27/10). Acara ini dihadiri Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Sleman.

Komisioner KASN Sri Hadiati Wara Kustriani mengatakan, prinsip dasar sistem Merit mendasarkan manajemen ASN pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang bersifat objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta dipandu dengan Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

"Penerapan sistem Merit ini memiliki manfaat tidak hanya bagi ASN namun juga organisasi, birokrasi, sekaligus masyarakat. Namun jika mengabaikannya, akan kehilangan kewenangan pembinaan manajemen ASN apabila terbukti melanggar sistem Merit serta mendapat perhatian khusus dari KPK," ujarnya.

Sri Hadiati menjelaskan ada delapan aspek penilaian sistem Merit. Penilaian terse-

but yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. "Sistem Merit Sleman memperoleh kategori III Baik dengan nilai 321. Untuk ukuran dengan daerah lain di Provinsi DIY sudah sangat luar biasa," tandasnya.

Sementara itu Bupati Kustini SP mengatakan, salah satu kriteria sistem Merit yang disebutkan dalam Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 adalah memiliki manajemen karier. "Pembangunan sistem Merit Pemkab Sleman dalam aspek pengembangan karier sejauh ini telah menetapkan Perbup Pola Karier dan Manajemen Talenta, serta telah menyusun rencana suksesi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi atau Kepala Perangkat Daerah," ujarnya.

Menurut Bupati, pembangunan sistem Merit Pemkab Sleman juga telah diverifikasi oleh KASN dan diharapkan dapat mendorong penerapan sistem Merit menjadi lebih baik. "Ke depan sesuai dengan arahan KASN dan panduan Permenpan, manajemen talenta dapat diterapkan dalam aspek promosi mutase, yang mana penyelenggaraan mutase dan promosi dilaksanakan berdasar rencana suksesi dengan mempertimbangkan pola karier instansi," tambahnya. **(Has)-f**

TINGKATKAN KECINTAAN TERHADAP BATIK Digelar, Jogja Batik Carnival 2021 di Tebing Breksi

SLEMAN (KR) - Dinas Pariwisata (Dispar) DIY kembali menyelenggarakan event Jogja Batik Carnival 2021 secara hybrid di Panggung Utara Destinasi Tebing Breksi Sleman, Kamis (28/10) hari ini mulai pukul 15.00. Kegiatan tersebut untuk mendukung agenda dua tahunan Jogja International Batik Biennale (JIBB) 2021 yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap citra positif DIY sebagai kota budaya dan wisata serta meningkatkan rasa cinta terhadap batik di kalangan masyarakat.

Kepala Dispar DIY Singgih Raharjo mengatakan, Jogja Batik Carnival digelar guna mendukung ajang JIBB 2021 yang sudah resmi dibuka Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Juni 2021. JIBB 2021 yang mengusung tema 'Borderless Batik' dan sub-tema 'From Heritage to Millennials Lifestyle' ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi berbasis kegiatan membuat batik dengan beragam ikutannya.

"Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan JIBB, Jogja Batik Carnival 2021 mengangkat tema Pesona Batik Nusantara. Tema ini sejalan dengan tema JIBB Borderless Batik yang menggambarkan semangat bahwa karya batik dapat menembus batas ruang dan waktu dan melampaui segala generasi," ujar Singgih, Rabu (27/10).

Singgih menjelaskan Yogyakarta ditetapkan menjadi Kota Batik Dunia oleh Dewan Kerajinan Batik Dunia atau World Craft Council (WCC) sejak 2014. Penghargaan tersebut diberikan sebab batik sebagai karya tradisional Indonesia telah menjadi

bagian tidak terpisahkan dari Yogyakarta. Ada tujuh kriteria yang ditetapkan WCC agar suatu daerah layak diberi penghargaan sebagai kota batik dunia yaitu nilai historis, orisinalitas, pelestarian, nilai ekonomi, ramah lingkungan, nilai global, dan keberlanjutan.

"Pengakuan internasional terhadap Yogya sebagai Kota Batik Dunia harus dipertahankan. Jangan sampai predikat tersebut dicabut atau bahkan hilang hanya karena masyarakat tak mampu menjaga kekayaan batik yang ada. Hal itu perlu kesadaran bersama untuk melestarikan batik, baik dari produsen maupun masyarakat sebagai konsumen," tegasnya.

Adapun rangkaian acara dalam kegiatan Jogja Batik Carnival 2021 menghadirkan penampilan dari Tari Mekhamikeun dari Aceh Singkil, Fashion Show Public Figure karya GEE Batik diiringi Antabo Band dengan Vokal G.A.J. Jogja Batik Carnival 2021 juga menampilkan busana Carnival dari SMKN 1 Saptosari Gunungkidul, Griya Paes Art, Plumeria, Seven A Plus, Sanggar Seni Anggrek, Mbarang Wirong dan Dimas Diajeng Bantul serta dimeriahkan bintang tamu dari Salatiga Carnival Centre dan Jember Fashion Carnival.

Acara akan diawali dengan menampilkan fashion show para public figure dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lainnya di DIY diiringi Antabo Band. Hadir pula kontingen dari Kabupaten Aceh Singkil yang membawakan tari tradisional serta fashion show dari pramugari dan pramugara Lion Group. **(Ira)-f**

PERLU DIBANGUN KOMITMEN BERSAMA Pengembangan Industri Bambu Butuh Solusi

SLEMAN (KR) - Isu *sustainable design* telah makin tertanam pada perdagangan internasional. Hal ini mendorong pelaku industri di beberapa negara Asia saling berlomba memunculkan kreasi-kreasi baru produk yang mengeksplorasi *renewable material* untuk memenuhi permintaan pasar yang makin tinggi, terutama dari negara-negara di benua Amerika dan Eropa.

"Melihat fakta tersebut perlu kiranya kita segera berbenah diri untuk dapat menyatukan persepsi dan langkah semua pihak yang terkait dengan pengembangan industri bambu dari hulu sampai hilir, agar dapat mendukung tahap kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi," jelas Bupati Kustini SP, Rabu (27/10), usai menjadi pem-

bicara kunci dalam webinar nasional 'Sinergi Pentahelix Dalam Pengembangan Industri Bambu Di Kabupaten Sleman'. Webinar diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, diikuti 300 peserta.

Bupati menjelaskan, pada tahun 2013 telah diter-

bitkan SK Bupati Nomor 306/Kep.KDH/A/2013 yang menetapkan bambu sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan. Selain itu, kerajinan bambu juga telah ditetapkan sebagai salah satu Produk Unggulan Kabupaten Sleman melalui SK Bupati Nomor 59.1/Kep/KDH/A/2021 tanggal 4 Oktober 2021. Berkenaan dengan hal tersebut, seluruh pemangku kepentingan yang meliputi perguruan tinggi, elemen masyarakat dan pemerintah membangun komitmen bersama dan bersinergi untuk mengembangkan industri bambu dari hulu hingga hilir.

"Terlebih, tanaman bambu telah cukup lama menjadi komoditas indus-

tri di Kabupaten Sleman. Di sentra-sentra bambu yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Sleman telah lahir beragam produk kerajinan berbahan dasar bambu, baik diproduksi dalam skala mikro maupun dalam skala usaha kecil-menengah," kata Bupati.

Ditambahkan, Pemkab Sleman juga mengapresiasi dukungan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang telah mendorong terjadinya kolaborasi antara akademisi dengan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga dapat tumbuh optimisme, serta menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang menjadi kendala pengembangan industri bambu Sleman. **(Has)-f**

MAJU LOMBA TINGKAT DIY Gambang Stunting, Inovasi Posyandu Kasuari

NGEMPLAK (KR) - Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kasuari di Padukuhan Malangrejo Kalurahan Ngemplak mewakili Kabupaten Sleman dalam lomba Posyandu tingkat DIY Tahun 2021. Tim evaluasi dari DIY, Rabu (27/10) melakukan verifikasi langsung disambut Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Aji Wulantara.

Ketua Tim Juri Evaluasi Sukanto mengatakan, lomba posyandu kali ini difokuskan pada pengelolaan posyandu di tingkat kalurahan. Kegiatan lomba ini juga sekaligus disertai kegiatan pemantauan eksistensi kelompok kerja operasional (pokjanal) posyandu di kabupaten, kapanewon dan pokja posyandu kalurahan. "Pemantauan terkait program kerja, kegiatan serta dukungan anggaran untuk operasional pokjanal posyandu," ujarnya.

Sementara Aji Wulantara berharap melalui momentum lomba tersebut mampu tercipta tata kelola dan model pembinaan



KR-Istimewa

Kegiatan di Posyandu Kasuari.

yang ideal yang dapat diadopsi oleh semua Posyandu di wilayah Kabupaten Sleman. Sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di posyandu.

Dalam paparannya, Sekretaris Posyandu Kasuari Malangrejo Muslimah menjelaskan, selain memiliki posyandu balita, juga memiliki posyandu untuk lansia dan remaja. Posyan-

du Kasuari juga memiliki beberapa inovasi yakni, Gambang Stunting (Gerakan Menimbang Cegah Stunting), meliputi pendataan balita, penimbangan balita di posyandu, kader akan melakukan jemput bola mengajak untuk menimbang setiap bulan, analisa status gizi, dan penanganan balita dengan masalah gizi segera sebelum kronis/ stunting.

"Selain itu juga terdapat

inovasi 'Pecah Ranting Hiburane Rakyat' singkatan dari Pencegahan Rawan Stunting Hilangkan Gizi Buruk Tingkatkan Ekonomi Rakyat. Melalui inovasi ini, penanggulangan stunting dilakukan dengan pemberian makanan tambahan berupa bahan lauk yang mengandung protein hewani, terutama ikan, ayam, telur, dan olahannya," ungkap Muslimah. **(Has)-f**



DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274) 868413, Fax (0274) 868413

PENGAWASAN PERDA OLEH KOMISI A DPRD SLEMAN

Optimalkan Penindakan Peredaran Mihol Ilegal



KR-Saifulah Nur Ichwan

H Ngadiman SAg MSI

SLEMAN (KR) - Pengawasan dan penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol (mihol) di Kabupaten Sleman perlu ditingkatkan dan optimalkan. Mengingat peredaran mihol secara ilegal ini dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan wilayah.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sleman H Ngadiman SAg MSI mengatakan, banyak kejadian kejahatan dipicu karena terpengaruh minuman beralkohol.

Jika pengawasan dan penindakannya tidak ditingkatkan, dikhawatirkan dapat membuat resah masyarakat.

"Kami berharap, pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk menekan peredaran mihol ilegal. Salah satunya operasi lebih diperbanyak lagi," kata Ngadiman, Rabu (27/10).

Untuk mengoptimalkan penindakan peredaran mihol ilegal, Komisi A DPRD Kabupaten Sleman saat ini sedang melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelanggaran minuman oplosan. Dalam rapat dengar pendapat dengan masyarakat maupun Sat Pol PP, ada Pasal yang perlu dilakukan perubahan.

"Utamanya di Pasal 37 mengenai ketentuan pidana. Dengan adanya ketentuan saat ini, dinilai kurang maksimal dalam proses penindakannya," ucap politisi dari PPP ini.

Dikatakan, dalam pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar peredaran dan

penjualan mihol secara ilegal dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Dengan ancaman pidana paling lama 6 bulan, penyidikannya secara singkat.

"Dengan penyidikan singkat itu, hasil operasi dilaporkan ke Polres. Kemudian Polres akan meneruskan ke kejaksaan. Proses pelimpahan berkas dari Polres ke ke-

jaksaan itu butuh waktu sekitar 2 bulan. Jika dengan ketentuan itu, Sat Pol PP hanya bisa melakukan penyidikan sekitar 6 kali dalam setahun," katanya.

Untuk itu, Komisi A akan mengusulkan sanksi atau pidana diganti yakni pidana maksimal 3 bulan kurungan. Dengan ancaman itu, Sat Pol PP bisa melakukan penyidikan cepat karena ketika tertangkap tangan bisa lang-

sung disidik dan diajukan ke pengadilan.

"Penyidikan cepat itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai kewenangan sebagai penuntut dalam persidangan. Dengan cara itu, volume bisa lebih banyak lagi karena setiap bulan bisa 4-5 kali sidang," tegasnya.

Hal senada dikatakan Happy Brilliant Srikandy SE. Menurutnya, berdasarkan masukan dari masyarakat maupun Sat Pol PP, efek jera antara ancaman sanksi paling lama 3 bulan dengan 6 bulan bagi pelanggar tetap sama. Untuk itu pihaknya meminta penindakan terhadap pelanggar lebih banyak lagi. "Kami sarankan sanksi dikembalikan ke 3 bulan lagi. Dengan banyak pelanggar yang ditindak, harapannya bisa menekan peredaran mihol ilegal," kata Happy.

Di samping itu, anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini juga mengusulkan untuk denda ada minimalnya. Tujuannya untuk membuat jera masyarakat yang melanggar. "Selama ini denda maksimal Rp 50 juta. Kami berharap, besok



KR-Istimewa

Happy Brilliant Srikandy SE

dendanya ada minimal supaya masyarakat berpikir ulang ketika akan mengulangi lagi perbuatannya," sarannya.

Sedangkan untuk pasal lainnya, Happy melihat Perda No 8 Tahun 2019 ini lengkap substansinya dibandingkan dengan Perda No 8 Tahun 2007 lalu. Bahkan minuman beralkohol oplosan sudah di atur dalam perda tersebut. "Untuk pasal lain, sepertinya sudah cukup lengkap. Sehingga tidak perlu ada perubahan di pasal lainnya," pungkasnya. **(Sni)-f**



KR-Istimewa

Happy Brilliant saat menggelar rapat dengar pendapat dengan masyarakat.